



LAKIP BAPPEDA

KABUPATEN BANGKALAN

TAHUN
20
20



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKALAN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan Tahun 2020.

Penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bangkalan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 ini jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan, serta berguna bagi semua pihak.

Bangkalan, 10 Februari 2021



EKO SETIAWAN, S.Si, MT
NIP. 19751121 200312 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Lampiran		iv
Ikhtisar Eksekutif		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
	C. DASAR HUKUM	3
	D. GAMBARAN UMUM OPD	4
	E. TUGAS FUNGSI ORGANISASI	5
	F. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	8
	A. PERENCANAAN KINERJA	8
	B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	9
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	12
	A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	12
	B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020	22
BAB IV	PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matrik Hubungan Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan dan Target	9
Tabel 2.2	Matriks Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	9
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2020	10
Tabel 2.4	Rincian Program dan Indikator Program	11
Tabel 2.5	Rincian Program dan Anggaran	11
Tabel 3.1	Kategori Penilaian	12
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Pada Tujuan dan Sasaran	13
Tabel 3.3	Perbandingan Kinerja Pada Tujuan dan Sasaran	14
Tabel 3.4	Perbandingan Kinerja s.d Akhir Periode Renstra Pada Tujuan dan Sasaran	15
Tabel 3.5	Indikator Capaian Program Kinerja	22
Tabel 3.6	Alokasi Anggaran per Sasaran	24
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Matrik Renstra
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Pemerintah Kabupaten Bangkalan
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 memfokuskan pada capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan yang secara utuh tercakup dalam 1 Tujuan dan 3 Sasaran Strategis (SS) yang menjadi kompetensi utama BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dengan dilengkapi oleh masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara keseluruhan, capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**” yaitu sebesar 96% tercapai. Adapun realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 4.595.678.004,00** atau **96%** persen dari pagu anggaran sebesar **Rp. 4.769.735.556,50**

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai BAPPEDA Kabupaten Bangkalan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang ada, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

Menyadari hal tersebut, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *Good Governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan Perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas tersebut, dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah juga sebagai bahan evaluasi dan rangkaian program yang telah direncanakan pada awal Tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Tahunan yang telah disusun hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan di masa mendatang.

2. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan 2021 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).
- b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi Masyarakat dan lingkungannya.
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);

11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;

D. GAMBARAN UMUM OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan.

Dengan demikian untuk melaksanakan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan tersebut, maka dijabarkan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

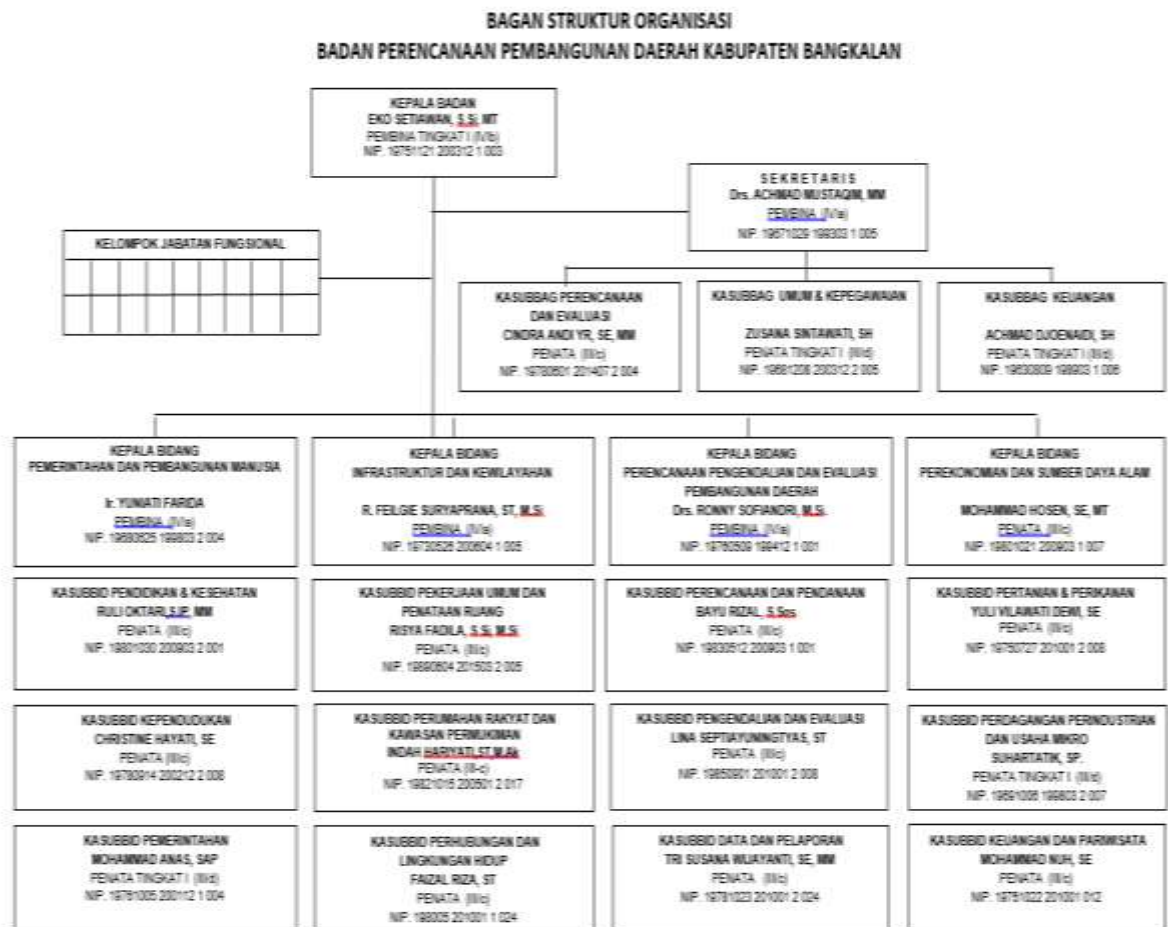
tugas dan fungsinya

E. TUGAS FUNGSI ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan, antara lain meliputi :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Sub Bagian Umum.
3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pertanian dan Perikanan ;
 - Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Mikro ;
 - Sub Bidang Keuangan dan Pariwisata.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan ;
 - Sub Bidang Kependudukan ;
 - Sub Bidang Pemerintahan.
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan ;
 - Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi ;
 - Sub Bidang Data dan Pelaporan.
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
 - Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ;
 - Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Adapun Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :



F. SISTIMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan selama Tahun 2020. Capaian Kinerja (*Performance Results*) 2020 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah Celah Kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 adalah sebagai berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Sebagai konsekuensi logis dari dinamika perubahan lingkungan yang begitu cepat dan tuntutan masyarakat maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan perlu mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Untuk itu diperlukan visi sebagai cara pandang ke depan tentang kemana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Visi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan disusun berdasarkan kriteria - kriteria penulisan visi, yaitu singkat, jelas, mudah diingat, menarik dan menantang.

1. VISI

Adapun Visi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal”

2. MISI

Adapun Misi untuk mewujudkan Visi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

“Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi”

3. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan Misi dan merupakan *“result”* (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan atau gambaran kondisi yang ingin dicapai dimasa datang.

Guna mewujudkan misi diatas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan, yaitu :

“Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Perencanaan Pembangunan Yang Efektif”.

Tabel 2.1

Matrik Hubungan antara Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan dan Target

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Perencanaan Pembangunan Yang Efektif	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam mendukung Nilai SAKIP	22,74

4. SASARAN

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan diatas, adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif”

“Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan”

Tabel 2.2

Matriks Hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Perencanaan Pembangunan Yang Efektif	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif	- Persentase Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas Baik - Persentase Indikator Kinerja RPJMD Dengan Capaian Hasil Minimal 80 %
		Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BAPPEDA Kabupaten Bangkalan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahun 2020. Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan tahun 2020 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula	Target
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif	Persentase Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas Baik	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas Baik}}{\sum \text{Perangkat Daerah}}$	69,23
		Persentase Indikator Kinerja RPJMD Dengan Capaian Hasil Minimal 80 %	$\frac{\sum \text{Indikator Kinerja RPJMD Dengan Capaian Hasil Minimal 80 \%}}{\sum \text{Seluruh Indikator Kinerja RPJMD}}$	70,00
	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	86,00

Tabel 2.4

Rincian Program dan Indikator Program

Program		Indikator Program
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan
2.	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator kinerja Program
		Rata-Rata Persentase keselarasan antar dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra-Renja)
3.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (KOSDA)	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (KOSDA) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik
4.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik
5.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (INFRASWIL)	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (INFRASWIL) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik

Tabel 2.5

Rincian Program dan Anggaran

Program		Anggaran		Ket.
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	Rp.	1.631.955.141,50	APBD
2.	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	Rp.	1.974.030.534,00	APBD
3.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (KOSDA)	Rp.	169.716.419,00	APBD
4.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	Rp.	230.028.200,00	APBD
5.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (INFRASWIL)	Rp.	764.005.262,00	APBD
		Rp.	4.769.735.556,50	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil pengukuran kinerja terhadap 5 Program dan 36 kegiatan, menunjukkan bahwa secara umum BAPPEDA Kabupaten Bangkalan telah mencapai kinerja baik terkait perencanaan pembangunan daerah. Meski demikian masih terdapat beberapa indikator yang masih memiliki target sangat rendah. Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka penetapan indikator - indikator kinerja serta rencana pencapaiannya dilakukan sejak awal perencanaan program dan kegiatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dari setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai oleh indikator kinerja tersebut, sehingga diketahui selisih kinerjanya (*performance gap*). Berdasarkan *performance gap* tersebut, dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam proses pengukuran kinerja tersebut, diperhatikan prinsip - prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan, maka telah kami tetapkan standart pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kategori Penilaian

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	85% sampai dengan 100 %	Sangat Berhasil
2.	70 % s/d kurang dari 85 %	Berhasil
3.	55 % s/d kurang dari 70 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Tujuan dan Sasaran

Tujuan : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Perencanaan Pembangunan yang Efektif

Sasaran : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif.
Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan

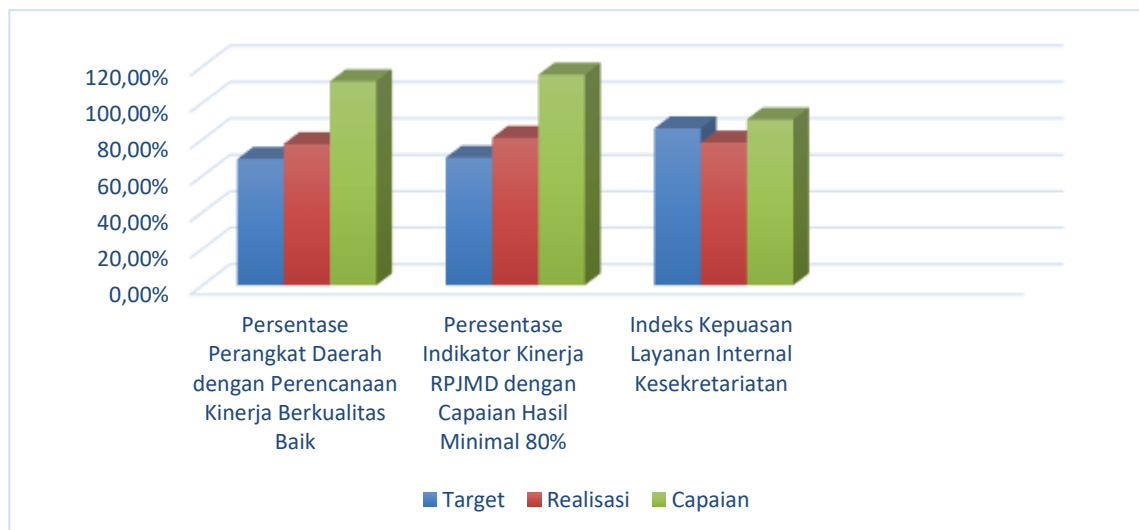
Pencapaian Kinerja

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Pada Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif.	- Persentase Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas Baik	69,23%	77,42%	111,83%
		- Persentase Indikator Kinerja RPJMD dengan Capaian Hasil Minimal 80%	70,00%	80,83%	115,47%
	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	- Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	86,00%	78,17%	90,90%

Grafik 3.1 Pencapaian Kinerja Pada Tujuan dan Sasaran



Pada sasaran ” **Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang efektif** ” diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

1. Target pada indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas Baik untuk tahun 2020 adalah sebesar 69,23 persen dengan realisasi sebesar 77,42 persen, sehingga target

tersebut memiliki tingkat capaian sebesar 111,83 persen yang berada di kategori “Sangat Berhasil”.

2. Target pada indikator kinerja Peresentase Indikator Kinerja RPJMD dengan Capaian Hasil Minimal 80% untuk tahun 2020 adalah sebesar 70,00 persen dengan realisasi sebesar 80,83 persen, sehingga target tersebut memiliki tingkat capaian sebesar 115,47 persen yang berada di kategori “Sangat Berhasil”.

Sasaran ” **Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan** ” diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

1. Target pada indikator kinerja “ Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan “ untuk tahun 2020 adalah sebesar 86,00 persen dengan realisasi sebesar 78,17%, sehingga target tersebut memiliki tingkat capaian sebesar 97,67% persen yang berada di kategori “Sangat Berhasil”.

Perbandingan Kinerja

Tabel 3.3

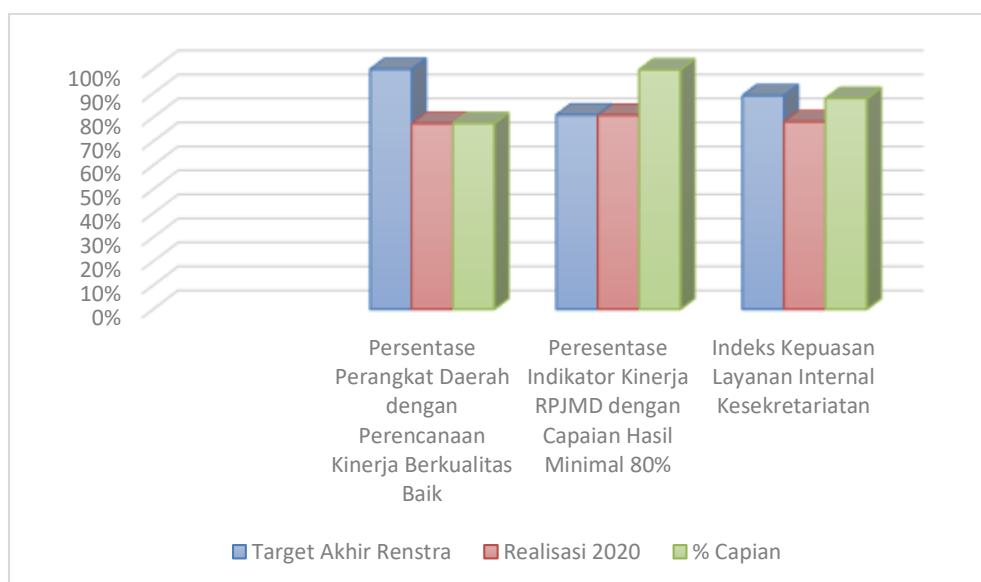
Perbandingan Kinerja Pada Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	
				2019	2020
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif.	Persentase Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas Baik	69,23%	63,46%	77,42%
		Persentase Indikator Kinerja RPJMD dengan Capaian Hasil Minimal 80%	70,00%	80,00%	80,83%
	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	86,00%	82,32%	78,17%

Tabel 3.4

Perbandingan Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
Pada Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir Renstra	Realisasi	% Capaian
				2020	
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Perencanaan Pembangunan yang Efektif	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif.	Persentase Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas Baik	100%	77,42%	77,42%
		Persentase Indikator Kinerja RPJMD dengan Capaian Hasil Minimal 80%	81 %	80,83%	99,79%
	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	89 %	78,17%	87,83%

Grafik 3.3 Perbandingan Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Pada Tujuan dan Sasaran

1. Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas Baik mencapai 77,42% Jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA di tahun 2023 sebesar 100 persen.
2. Indikator Kinerja Persentase Indikator Kinerja RPJMD dengan Capaian Hasil Minimal 80% mencapai 80,83%. Jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA di tahun 2023 sebesar 81 persen.

3. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan mencapai 78,17%. Jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA di tahun 2023 sebesar 89 persen.

Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan di Lingkungan BAPPEDA

1) Program Pelayanan Kesekretariatan Kegiatannya Meliputi

- 1) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
 - Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :
 - Terpenuhinya penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda
 - Meningkatnya kinerja aparatur Bappeda
- 2) Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah
 - Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :
 - Terpenuhinya Pelaksanaan dan Meningkatnya Kinerja Aparatur di lingkungan Bappeda
- 3) Kegiatan Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah
 - Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut : Rapat Laporan Barang Milik Daerah Per Semester 2 Kali
- 4) Kegiatan Pemeliharaan dan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
 - Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :
 - Meningkatnya dan Terpenuhinya Kegiatan Aparatur di lingkungan BAPPEDA
- 5) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :
 - Terpenuhinya dukungan Internal OPD
- 6) Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai
 - Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
- 7) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur
- 8) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah

- Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :
 1. Terlaksananya Musrenbang RKPD
 2. Telah disusunnya Renja Bappeda
 3. Telah disusunnya Rentra Bappeda
- 9) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD
 - Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :
 1. Telah Disusunnya Laporan Kinerja Renja/RKPD dan APBD
- 10) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.365.650,00 terealisasi sebesar Rp 4.365.650,00,- Atau 100 %
 - * Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :
 1. Dokumen laporan keuangan Bappeda
- 11) Kegiatan Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional

2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan meliputi :

- 12) Kegiatan Koordinasi Teknis Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :
 1. Laporan Hasil Koordinasi Teknis Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah
 2. Laporan Hasil Koordinasi Teknis Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan (Usulan Musrenbang kecamatan, Berita Acara Forum konsultasi Publik Ranwal RKPD, Berita Acara Forum Perangkat Daerah).
- 13) Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :
 - Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan triwulanan dan Semester (Renja/RKPD, APBD, dan DAK)
- 14) Kegiatan Penyusunan Data Informasi dan Pelaporan Kinerja

- Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :
 - a. Tersusunnya Dokumen SIPD Tahun 2020
 - b. Laporan TBUPPD
 - c. Laporan Hasil Koordinasi
 - d. Dokumen Indeks Kesalehan Sosial

15) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

* Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023
- Dokumen RKPD 2021
- Dokumen P-RKPD 2020

16) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi TF-TSLP dengan anggaran

* Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- a) Laporan hasil fasilitasi dan koordinasi Tim Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TF-TSLP).

17) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Sistem Perencanaan Daerah

* Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- a) Laporan hasil pengembangan aplikasi sistem perencanaan daerah.

3) PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) meliputi :

18) Kegiatan Koordinasi, Integrasi Sinkroisasi dan Sinergitas Perencanaan sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Mikro

* Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Keselarasan dan Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, program dan penganggaran
- b. Terciptanya koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas antar Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Perdagangan, perindustrian dan Usaha Mikro dengan cara melepaskan ego sektoral masing masing

19) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan sub bidang Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Mikro

- Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:
 - a. Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pasar Rakyat
- 20) Kegiatan Koordinasi, Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan sub Bidang Keuangan dan Pariwisata
 - Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:
 - a. Keselarasan dan Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, program dan penganggaran
 - b. Terciptanya koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas antar Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Pariwisata dan Keuangan dengan cara melepaskan ego sektoral masing masing.
- 21) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan sub bidang Keuangan dan Pariwisata
 - Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:
 - a. Tersusunnya Dokumen Analisis Potensi Ekonomi Daerah
- 22) Kegiatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan sinergitas sub Bidang Pertanian dan Perikanan
 - Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:
 - a) Keselarasan dan Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, program dan penganggaran
 - b) Terciptanya koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas antar Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Pertanian dan Perikanan dengan cara melepaskan ego sektoral masing masing
 - c) Tersusunnya dokumen Penyusunan Pengembangan kawasan agropolitan Socah, Burneh, Bangkalan (Soburbang)
- 23) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan sub bidang Pertanian dan Perikanan
 - Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:
 - a. Tersusunnya Dokumen Master Plan Peternakan

4. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) meliputi :

- 24) Kegiatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan
 - * Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :
 - a) Laporan KISS Pendidikan dan Kesehatan
 - b) Laporan PDT(Pembangunan Daerah Tertinggal)
- 25) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan
 - * Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :
 - a) Dokumen Masterplan Pendidikan
- 26) Kegiatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan
 - * Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :
 - a) Laporan KISS Sub Bidang Pemerintahan
- 27) Kegiatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Kependudukan
 - * Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :
 - a) Laporan KISS Kependudukan
 - b) Laporan TKPK
- 28) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kependudukan
 - * Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :
 - a) Dokumen RAD KLA
 - b) Dokumen SPKD

5. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (INFRASWIL) meliputi :

- 29) Kegiatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - * Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :
 - Laporan Hasil Koordinasi Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

30) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

* Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- a) Peta Dasar RTRW.
- b) Dokumen PK RTRW

31) Kegiatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

* Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- a) Tercapainya perencanaan perangkat daerah lingkup Infrastuktur yang berkualitas baik.

32) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

* Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- a) Tersusunnya Dokumen RAD AMPL
- b) Tersusunnya Dokumen Jakstrada SPAM
- c) Tersusunnya Dokumen Pengembangan Drainase Perkotaan
- d) Penyusunan Dokumen Updating Perumahan Berbasis Aplikasi

33) Kegiatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup

* Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

- a) Dari usulan dan masalah di bidang perhubungan, lingkungan Hidup, informasi dan komunikasi serta persampahan diharapkan bisa diakomodir di musrenbang kabupaten, musrenbang Provinsi dan Musrenbangnas
- b) Membuat laporan akhir tahun anggaran sub bidang perhubungan, lingkungan hidup, informasi dan komunikasi serta persampahan.
- c) Mengumpulkan data hasil monitoring dan survey yang akan di tindak lanjuti pada musrenbang 2020 dst.

34) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup

* Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut :

a) Tersusunnya Dokumen Masterplan Persampahan

Tabel 3.5
Indikator Capaian Program Kinerja

	Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	95,50 %	84,32%	88,29%
2.	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator kinerja Program	45 %	88,35%	196%
		Rata-Rata Persentase keselarasan antar dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra-Renja)	45 %	74,24%	165%
3.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (KOSDA)	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (KOSDA) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik	90,91 %	87%	95,70%
4.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik	55,88 %	55%	98,43%
5.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (INFRASWIL)	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (INFRASWIL) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik	100 %	90,25%	90,25%

Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja

Secara umum hasil capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa indikator yang memiliki target kecil dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di BAPPEDA Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Keberhasilan pencapaian kinerja di BAPPEDA Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 adalah:

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, sehingga target kinerja telah terealisasi.
- b. Tersedianya dana yang mencukupi untuk melaksanakan tupoksi.
- c. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- d. Adanya sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas.
- e. Adanya kerjasama yang baik antar bagian dalam organisasi.
- f. Sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan rencana.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di BAPPEDA Kabupaten Bangkalan diantaranya kurangnya kompetensi SDM perencana dan keterbatasan data sehingga ketercapaian kinerja menjadi sangat kecil.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang ditetapkan, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2020.

Tabel 3.6

Alokasi Anggaran per Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran	% Anggaran
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif.	Persentase Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas Baik	1.163.749.881	98%
	Persentase Indikator Kinerja RPJMD dengan Capaian Hasil Minimal 80%	1.974.030.534	96%
Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	1.631.955.142	76%

Dari pagu belanja Tahun Anggaran 2020, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 4.595.678.004,00 atau 96,00 persen.

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% Anggaran	TINGKAT EFISIENSI
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif.	Persentase Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas Baik	77,42%	98%	126,58%
	Persentase Indikator Kinerja RPJMD dengan Capaian Hasil Minimal 80%	80,83%	96%	118,77%
Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	86%	76%	88,73%

Tingkat efisiensi dihitung melalui rumus (Nasoetion, 2011):

$$E = \frac{O}{I};$$

E = Efisiensi

O = Output

I = Input

Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu. Jika output yang dihasilkan lebih besar dari pada sumber daya yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai. Output dalam hal ini adalah prosentase capaian kinerja, sedangkan inputnya adalah prosentase penyerapan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang perencanaan pembangunan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Bangkalan. Di masa mendatang BAPPEDA Kabupaten Bangkalan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Bangkalan. BAPPEDA Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu penyangga utama birokrasi telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud birokrasi yang efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada kebutuhan rakyat.

Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan reformasi birokrasi ini melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang BAPPEDA Kabupaten Bangkalan akan melakukan berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait untuk

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan

mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

LAMPIRAN

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah melalui Perencanaan Pembangunan yang Efektif				Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam mendukung Nilai SAKIP	20,68	21,69	8.618.442.900	22,74	11.281.312.050	23,63	11.877.203.202	24,51	12.527.812.190	25,34	13.893.814.026	25,34	58.198.584.368		
	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif			Persentase Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik	44,23	59,62	2.573.962.600	69,23	3.005.000.000	73,08	3.398.000.000	98,08	3.145.000.000	100	3.665.000.000	80,00	15.786.962.600		
		4.02.4.02.01.2.8.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam (KOSDA)	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam (KOSDA) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik	63,64	81,82	495.000.000	90,91	540.000.000	100	698.000.000	100	650.000.000	100	815.000.000	100	3.198.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		4.02.4.02.01.2.8.01.	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	Laporan hasil Koordinasi Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	0	1 Dok. Lap.	30.000.000	1 Dok. Lap.	45.000.000	1 Dok. Lap.	100.000.000	1 Dok. Lap.	160.000.000	1 Dok. Lap.	160.000.000	5 Dok. Lap.	495.000.000		Bappeda
		4.02.4.02.01.2.8.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan yang tersusun	0	1 Dok	175.000.000	2 Dok	150.000.000	2 Dok	250.000.000	1 Dok.	180.000.000	1 Dok.	175.000.000	6 Dok.	930.000.000		Bappeda
		4.02.4.02.01.2.8.03	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Keuangan dan Pariwisata	Laporan hasil Koordinasi Sub Bidang Keuangan dan Pariwisata	0	1 Dok. Lap.	30.000.000	1 Dok. Lap.	40.000.000	1 Dok. Lap.	100.000.000	1 Dok. Lap.	130.000.000	1 Dok. Lap.	130.000.000	5 Dok. Lap.	430.000.000		Bappeda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
		4.02.4.02.01.2 8.04.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Keuangan dan Pariwisata	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Keuangan dan Pariwisata yang tersusun	0	1 Dok	120.000.000	1 Dok	185.000.000	1 Dok	130.000.000	0	1 Dok	150.000.000	3 Dok	585.000.000		Bappeda	
		4.02.4.02.01.2 8.05.	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Mikro	Laporan hasil koordinasi sub bidang perdagangan, perindustrian dan usaha mikro	0	1 Dok. Lap.	40.000.000	1 Dok. Lap.	45.000.000	1 Dok. Lap.	118.000.000	1 Dok. Lap.	180.000.000	1 Dok. Lap.	200.000.000	5 Dok. Lap.	583.000.000		Bappeda
		4.02.4.02.01.2 8.06.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Mikro	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Mikro yang tersusun	0	1 Dok	100.000.000	1 Dok	75.000.000		0	0	0	1 Dok	175.000.000		Bappeda		
		4.02.4.02.01.2 9	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik	29,41	44,12	490.000.000	55,88	500.000.000	58,82	1.120.000.000	97,06	735.000.000	100	1.090.000.000	100	3.935.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		4.02.4.02.01.2 9.01	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Laporan hasil Koordinasi Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Dok. Lap.	65.000.000	1 Dok. Lap.	80.000.000	1 Dok. Lap.	120.000.000	1 Dok. Lap.	185.000.000	1 Dok. Lap.	185.000.000	5 Dok. Lap.	635.000.000		Bappeda
		4.02.4.02.01.2 9.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang tersusun	0	1 Dok.	110.000.000	1 Dok.	100.000.000	1 Dok.	150.000.000	0	1 Dok.	200.000.000	4 Dok.	560.000.000		Bappeda	
		4.02.4.02.01.2 9.03	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan	Laporan hasil koordinasi sub Bidang Pemerintahan	0	1 Dok. Lap.	50.000.000	1 Dok. Lap.	100.000.000	1 Dok. Lap.	110.000.000	1 Dok. Lap.	200.000.000	1 Dok. Lap.	260.000.000	5 Dok. Lap.	720.000.000		Bappeda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
		4.02.4.02.01.2 9.04	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan yang tersusun	0		0		0	1 Dok	400.000.000		0		0	1 Dok	400.000.000		Bappeda
		4.02.4.02.01.2 9.05	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Kependudukan	Laporan hasil koordinasi sub Bidang Kependudukan	0	1 Dok. Lap.	65.000.000	1 Dok. Lap.	100.000.000	1 Dok. Lap.	120.000.000	1 Dok. Lap.	200.000.000	1 Dok. Lap.	270.000.000	5 Dok. Lap	755.000.000		Bappeda
		4.02.4.02.01.2 9.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kependudukan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kependudukan yang tersusun	0	2 Dok	200.000.000	1 Dok.	120.000.000	1 Dok.	220.000.000	1 Dok.	150.000.000	1 Dok.	175.000.000	6 Dok	865.000.000		Bappeda
		4.02.4.02.01.3 0	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (INFRASWIL)	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (INFRASWIL) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik	85,71	100	1.588.962.600	100	1.965.000.000	100	1.580.000.000	100	1.760.000.000	100	1.760.000.000	100	8.653.962.600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		4.02.4.02.01.3 0.01	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan hasil Koordinasi Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	1 Dok. Lap.	128.962.600	1 Dok. Lap.	160.000.000	1 Dok. Lap.	160.000.000	1 Dok. Lap.	180.000.000	1 Dok. Lap.	180.000.000	5 Dok. Lap.	808.962.600		Bappeda
		4.02.4.02.01.3 0.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersusun	0	2 Dok.	500.000.000	1 Dok.	500.000.000	1 Dok.	500.000.000	1 Dok.	500.000.000	1 Dok.	250.000.000	6 Dok.	2.250.000.000		Bappeda
		4.02.4.02.01.3 0.03	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Laporan hasil koordinasi sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0	1 Dok. Lap.	225.700.000	1 Dok. Lap.	275.000.000	1 Dok. Lap.	290.000.000	1 Dok. Lap.	320.000.000	1 Dok. Lap.	320.000.000	5 Dok. Lap.	1.430.700.000		Bappeda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		4.02.4.02.01.3.0.04	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang tersusun	1 Dok	4 Dok.	468.330.000	2 Dok.	550.000.000	1 Dok.	100.000.000	1 Dok.	230.000.000	2 Dok.	380.000.000	10 Dok.	1.728.330.000		Bappeda
		4.02.4.02.01.3.0.05	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Laporan hasil koordinasi sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0	1 Dok. Lap.	80.000.000	1 Dok. Lap.	150.000.000	1 Dok. Lap.	180.000.000	1 Dok. Lap.	230.000.000	1 Dok. Lap.	230.000.000	5 Dok. Lap	870.000.000		Bappeda
		4.02.4.02.01.3.0.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang tersusun	1 Dok.	1 Dok.	185.970.000	3 Dok.	330.000.000	2 Dok.	350.000.000	1 Dok.	300.000.000	2 Dok.	400.000.000	8 Dok.	1.565.970.000		Bappeda
				Persentase indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%	76,32	77,00	2.633.895.900	78,00	3.490.000.000	79,00	3.275.000.000	80,00	3.685.000.000	81,00	4.653.000.000	79,00	17.736.895.900		
		4.02.4.02.01.2.7.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator kinerja Program	75,00	80,00		82		85		87,00		88,00		88,00		Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
				Rata-Rata Persentase keselarasan antar dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra-Renja)	75,00	80,00	2.633.895.900	84	3.490.000.000	88	3.275.000.000	90,00	3.685.000.000	95,00	4.653.000.000	95,00	17.736.895.900		
		4.02.4.02.01.2.7.01	Koordinasi Teknis Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		14 Lap	10 Lap	673.740.500	12 Lap	985.000.000	12 Lap	1.060.000.000	8 Lap	895.000.000	13 Lap	1.443.000.000	50 Lap	5.056.740.500		tahun 2020 dan 2021 sifatnya penyediaan. Jika sdh terlaksana review RPMD di tahun 2020, maka tahun 2021
				Laporan hasil Koordinasi Teknis Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka menengah	6 Lap.	3 Lap	163.340.500	5 Lap.	435.000.000	5 Lap.	435.000.000	1 Lap.	180.000.000	6 Lap.	698.000.000	15 Lap	1.911.340.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				Laporan hasil Koordinasi Teknis Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	8 Lap.	7 Lap	510.400.000	7 Lap	550.000.000	7 Lap	625.000.000	7 Lap	715.000.000	7 Lap	745.000.000	35 Lap	3.145.400.000		kegiatan dan anggaran dialihkan ke yang lain
		4.02.4.02.01.2 7.02	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		12 Dok. Lap.	12 Dok. Lap.	206.155.400	13 Dok. Lap.	230.000.000	13 Dok. Lap.	270.000.000	13 Dok. Lap.	300.000.000	13 Dok. Lap.	330.000.000	64 Dok. Lap.	1.336.155.400		Bappeda
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12 Dok. Lap.	12 Dok. Lap.	206.155.400	12 Dok. Lap.	206.320.000	12 Dok. Lap.	246.320.000	12 Dok. Lap.	276.320.000	12 Dok. Lap.	306.320.000	60 Dok. Lap.	1.241.435.400		Bappeda
				Jumlah Laporan hasil pengendalian dokumen perencanaan Perangkat Daerah				1 Lap.	23.680.000	1 Lap.	23.680.000	1 Lap.	23.680.000	1 Lap.	23.680.000	4 Lap	94.720.000		Bappeda
		4.02.4.02.01.2 7.03	Penyusunan Data Informasi dan Pelaporan Kinerja			7 Dok.Lap	779.000.000	7 Dok.Lap	920.000.000	7 Dok.Lap	1.010.000.000	7 Dok.Lap	1.180.000.000	7 Dok.Lap	1.250.000.000	35 Dok.Lap	5.139.000.000		Bappeda
				Dokumen SIPD Semesteran	1 Dok	2 Dok.	59.000.000	2 Dok.	70.000.000	2 Dok.	90.000.000	2 Dok.	120.000.000	2 Dok.	140.000.000	10 Dok.	479.000.000		
				Laporan hasil koordinasi	0	4 Lap.	120.000.000	4 Lap.	140.000.000	4 Lap.	160.000.000	4 Lap.	190.000.000	4 Lap.	220.000.000	20 Lap.	830.000.000		
				Fasilitasi Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TBUPPD)	0	1 Dok. Lap.	600.000.000	1 Dok. Lap.	660.000.000	1 Dok. Lap.	700.000.000	1 Dok. Lap.	800.000.000	1 Dok. Lap.	810.000.000	5 Dok. Lap.	3.570.000.000		
				Indeks Kesalehan Sosial	0	1 Dok		1 Dok	50.000.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	70.000.000	1 Dok	80.000.000	5 Dok	260.000.000		
		4.02.4.02.01.2 7.04	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				515.000.000		650.000.000		680.000.000		600.000.000		850.000.000		3.295.000.000		Bappeda
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun	5 Dok	3 Dok		3 Dok	650.000.000	3 Dok	680.000.000	3 Dok	600.000.000	4 Dok	850.000.000	15 Dok	2.780.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				Dokumen RKPD dan PRKPD		2 Dok	300.000.000									300.000.000			
				Dokumen RPJMD 2018-2023		1 Dok	215.000.000									215.000.000			
		4.02.4.02.01.2 7.05	Fasilitasi dan Koordinasi TF-TSLP	Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Tim Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TF-TSLP)		1 Lap.	75.000.000	1 Lap.	125.000.000	1 Lap.	175.000.000	1 Lap.	180.000.000	1 Lap.	200.000.000	5 Lap.	755.000.000		Bappeda
		4.02.4.02.01.2 7.06	Pengembangan Aplikasi Sistem Perencanaan Daerah	Laporan hasil pengembangan aplikasi sistem perencanaan daerah		2 Lap	245.000.000	1 Lap.	180.000.000	1 Lap.	80.000.000	1 Lap.	80.000.000	2 Lap	130.000.000	7 Lap	715.000.000		Bappeda
		4.02.4.02.01.2 7.07	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Updating Aplikasi SIPD		1 Aplikasi	40.000.000		-		-		-		-	-	40.000.000		Bappeda
		4.02.4.02.01.2 7.08	Peningkatan Kapasitas Perencana	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/ seminar		85 org	100.000.000,00	150 org	400.000.000	-	-	150 org	450.000.000	150 org	450.000.000	685 org	1.400.000.000		
	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariat an			Indek Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatian		85,00	3.410.584.400	86,00	4.786.312.050	87,00	5.204.203.202	88,00	5.697.812.190	89,00	5.575.814.026	87,00	24.674.725.868		
		0.00.4.02.01.1 6	Program Pelayanan Kesekretariatian	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatian		95,00	3.410.584.400	95,50	4.786.312.050	96,00	5.204.203.202	96,50	5.697.812.190	97,00	5.575.814.026	97,50	24.674.725.868	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		0.00.4.02.01.1 6.01	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran				1.293.127.800		1.626.752.050		1.734.703.202		1.906.924.190		2.010.977.000		8.572.484.242		Bappeda
				Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan		11 Jenis	155.532.800	11 Jenis	278.182.050	11 Jenis	280.000.000	11 Jenis	307.000.000	11 Jenis	321.000.000	55 Jenis	1.341.714.850		
				Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan		19 Jenis	1.137.595.000	19 Jenis	1.348.570.000	19 Jenis	1.454.703.202	19 Jenis	1.599.924.190	19 Jenis	1.689.977.000	95 Jenis	7.230.769.392		
		0.00.4.02.01.1 6.02	Kedinasan dalam daerah dan luar daerah				306.000.000		320.000.000		450.000.000		530.000.000		400.000.000		2.006.000.000		Bappeda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan		10 Kali	6.000.000	10 Kali	7.000.000	10 Kali	8.000.000	10 Kali	9.000.000	10 Kali	10.000.000	50 Kali	40.000.000		
				Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan		100 Kali	300.000.000	100 Kali	313.000.000	110 Kali	442.000.000	110 Kali	521.000.000	110 Kali	390.000.000	530 Kali	1.966.000.000		
		0.00.4.02.01.1 6.03	Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah				8.600.000		15.000.000		20.000.000		23.000.000		26.542.026		93.142.026		Bappeda
				Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun		14 Dok.	8.600.000	14 Dok.	15.000.000	14 Dok.	20.000.000	14 Dok.	23.000.000	14 Dok.	26.542.026	70 Dok.	93.142.026		
		0.00.4.02.01.1 6.04	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur				201.215.800		377.090.000		570.000.000		520.000.000		410.000.000		2.078.305.800		Bappeda
				Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara		10 Jenis	122.964.950	8 Jenis	177.090.000	10 Jenis	320.000.000	8 Jenis	260.000.000	8 Jenis	260.000.000	44 Jenis	1.140.054.950		
				Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara		1 Unit	78.250.850	1 Unit	200.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	260.000.000	1 Unit	150.000.000	5 Unit	938.250.850		
		0.00.4.02.01.1 6.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur				789.991.300		1.082.470.000		1.199.500.000		1.378.888.000		1.075.132.000		5.525.981.300		Bappeda
				Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan		13 Jenis	706.431.700	13 Jenis	832.470.000	13 Jenis	949.500.000	13 Jenis	1.128.888.000	13 Jenis	925.132.000	65 Jenis	4.542.421.700		
				Jumlah prasarana aparatur yang diadakan		1 Unit	83.559.600	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	150.000.000	5 Unit	983.559.600		
		0.00.4.02.01.1 6.6	Peningkatan Disiplin Pegawai				37.275.000		75.000.000		77.000.000		94.000.000		53.240.000		336.515.000		Bappeda
				Jumlah pakaian aparatur dan kelengkapan yang diadakan		161 Buah	37.275.000	170 Buah	75.000.000	170 Buah	77.000.000	170 Buah	94.000.000	170 Buah	53.240.000	850 Buah	336.515.000		
		0.00.4.02.01.1 6.07	Peningkatan Kapasitas Aparatur				320.722.000		400.000.000		220.000.000		450.000.000		350.000.000		1.740.722.000		Bappeda
				Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/ seminar		110 orng	320.722.000	146 orng	400.000.000	90 orng	220.000.000	146 orng	450.000.000	110 orng	350.000.000	602 orng	1.740.722.000		
		0.00.4.02.01.1 6.08	Penyusunan Perencanaan dan Informasi				393.818.500		800.000.000		825.000.000		670.000.000		1.124.000.000		3.812.818.500		Bappeda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun		3 dok	52.000.000	3 dok	80.000.000	3 dok	90.000.000	2 dok	100.000.000	2 dok	100.000.000	12 dok	422.000.000		
				Jumlah Dokumen penganggaran PD yang tersusun		4 dok	31.700.000	4 dok	50.000.000	4 dok	60.000.000	4 dok	70.000.000	4 dok	70.000.000	20 dok	281.700.000		
				Jumlah data dan informasi PD			0	1 Data	25.000.000	1 Data	30.000.000	1 Data	35.000.000	1 Data	40.000.000	4 Data	130.000.000		
				Jumlah Stakeholder yang hadir di Musrenbang RKPD/RPJMD		400 orng	310.118.500	800 orng	645.000.000	800 orng	645.000.000	400 orng	465.000.000	800 orng	914.000.000	3200 orng	2.979.118.500		
		0.00.4.02.01.1 6.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah				17.784.000		35.000.000		45.000.000		52.000.000		52.000.000		201.784.000		Bappeda
				Jumlah Laporan triwulanan & semesteran monev PD yang tersusun (APBD, Renia/RKPD)		8 Lap.	7.820.000	8 Lap.	15.000.000	8 Lap.	20.000.000	8 Lap.	25.000.000	8 Lap.	25.000.000	40 Lap.	92.820.000		
				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaPD yang tersusun.		1 dok.	9.964.000	1 dok.	20.000.000	1 dok.	25.000.000	1 dok.	27.000.000	1 dok.	27.000.000	5 dok.	108.964.000		
		0.00.4.02.01.1 6.10	Penyusunan Laporan Keuangan				10.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		115.000.000		Bappeda
				Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun per semester/prognosis /akhir tahun		1 dok.	10.000.000												
				Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulanan/semest				66 Lap	9.000.000	66 Lap	11.000.000	66 Lap	12.500.000	66 Lap	12.500.000	264 Lap	45.000.000		
				Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun				1 dok.	11.000.000	1 dok.	14.000.000	1 dok.	17.500.000	1 dok.	17.500.000	4 Dok	60.000.000		
		0.00.4.02.01.1 6.11	Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten/Provinsi /Nasional				32.050.000		35.000.000		38.000.000		43.000.000		43.923.000		191.973.000		Bappeda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi		1 Keg.	32.050.000	2 Keg.	35.000.000	2 Keg.	38.000.000	2 Keg.	43.000.000	2 Keg.	43.923.000	7 Keg.	191.973.000		



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN

T
A
H
U
N
20
20

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAPPEDA

JL. SOEKARNO - HATTA NO. 35 A TELP. (031) 3095482



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bang Aelan



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKO SETIAWAN, S.Si MT**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangkalan

Selanjutnya disebut pihak pertama

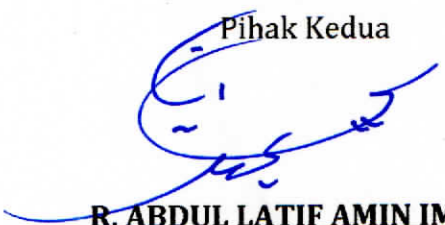
Nama : **R. ABDUL LATIF AMIN IMRON**
Jabatan : Bupati Bangkalan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, 29 September 2020

Pihak Kedua


R. ABDUL LATIF AMIN IMRON

Pihak Pertama


EKO SETIAWAN, S.Si MT

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Soekarno - Hatta No. 35 A Telp. (031) 3095482 Fax. 3096482

BANGKALAN 69116

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif	persentase perangkat daerah dengan perencanaan kinerja berkualitas baik	69,23 %
		Persentase indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%	70,00 %
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	86,00 %

Program

- | | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) | Rp 169.716.419 |
| 2 | Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) | Rp 230.028.200 |
| 3 | Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Rp 764.005.262 |
| 4 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Rp 1.974.030.534 |
| 5 | Program Pelayanan Kesekretariatan | Rp 1.631.955.141,50 |

Bangkalan, 29 September 2020

BUPATI BANGKALAN

R. ABDUL LATIF AMIN IMRON

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN BANGKALAN

EKO SETIAWAN, S.Si MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19751121 200312 1 003